

Akademisi Lintas Negara Bahas Keterbukaan Pemerintah di UNAIR

UNAIR NEWS – Akademisi lintas negara bertemu dan membahas *Open Government* atau keterbukaan pemerintah. Ilmuwan itu adalah Yanuar Nugraha Deputy II Executive Office of The President of The Republik of Indonesia, Ph.D, Tippawan Lorsuwannarat dari Thailand, Ph.D, Dr. Violeta Schubert dari Universitas Melbourne Australia, dan Prof. Peter Grabosky dari Australian National University (ANU).

Mereka membahas *Open Government* itu dalam konferensi internasional yang diadakan Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, bekerjasama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA). Konferensi tahunan itu, kali ini mengnagkat tema "*Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*".

Dalam presentasinya, Prof. Peter Grabosky memberikan masukan terkait pentingnya batasan data dan informasi yang dapat dirilis oleh Negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

"Adanya tansparansi bukan berarti pemerintah harus rilis semuanya. Kenapa? Karena juga berkaitan dengan keamanan negara. Tidak mungkin kita merilis data material tertentu yang penting dan terkait dengan keamanan negara. Bisa terancam," katanya.

Menurutnya, data-data yang bisa di-*publish* adalah yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, diolah menjadi *software*, misalnya. Seperti kemunculan aplikasi layanan transportasi *Go-Jek* yang justru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Harus ada batasan tertentu. Sepertinya di Indonesia masih abu-abu terkait hal itu," penilaian Prof. Peter.

Sementara itu dalam wawancara dengan pers, Agie Nugroho Soegiono, dosen muda Departemen Administrasi Negara FISIP UNAIR berpendapat bahwa pemerintah Indonesia berupaya signifikan dalam menuju *Open government*. Saat ini, pemerintah sedang dalam upaya menyusun regulasi terkait *Satu Data Indonesia*, sebuah inisiatif Kantor Staf Presiden untuk meningkatkan pemanfaatan data pemerintah. Upaya ini dilakukan mengingat pemerintah belum memiliki definisi khusus terkait sesuatu yang dimaksud dengan 'data'.

"Keterbukaan informasi publik itu terkait informasi data yang sudah diolah. Sedang kita sendiri belum punya definisi yang sesuai dengan landasan hukum. Alhasil, ketika orang minta informasi yang berkaitan dengan data di pemerintahan, itu bentuknya macam-macam. Saat ini pemerintah sedang menuju ke arah sana," kata alumnus program Master Universitas Edinburgh ini.

Rektor UNAIR Prof. Dr. Moh Nasih, SE., MT., Ak., CMA mengatakan, para pengelola pemerintahan tidak cukup mampu untuk mengembangkan ide-ide. Harus ada bagian yang bekerja mengembangkan ide, gagasan, sehingga motto *Kerja, Kerja, Kerja* dapat berjalan optimal.

"Ini bagian dari kontribusi positif keilmuan administrasi publik dalam hal pemikiran. *Open government* menjadi sebuah keharusan. Mudah-mudahan hasil dari konferensi ini dapat memberikan kontribusi ide yang akan bermanfaat untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Sedangkan President of IAPA, Eko Prasajo, mengatakan tema konferensi kali ini sangat cocok bagi keberlangsungan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

"Ada sejumlah 89 paper dalam konferensi ini yang dibahas. Hasil konferensi ini tidak hanya akan disebar di kalangan

akademik, tetapi juga akan dimanfaatkan untuk pemerintah,”
kata Eko Prasjo. (*)

Penulis : Binti Q. Masrurroh

Editor: Bambang Bes